Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol.10 No. 2 Mei 2025, pp. 324 - 343
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5290
■ Received : 12 Maret 2025 ■ Revised : 14 April 2025 ■ Accepted : 14 April 2025

Pendekatan Pentahelix dalam Tata Kelola Desa Wisata Berkelanjutan di Desa Bantaragung Kabupaten Majalengka

Aos Kuswandi[1*], M. Harun Al Rasyid[2], Siti Nuraini[3], Zulfanida Nurul Sa'diyyah[4]
[1] Universitas Islam 45, Indonesia
[2] Universitas Islam 45, Indonesia
[3] Universitas Islam 45, Indonesia
[4] Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia , Indonesia

Email Correstpondence: koeswandi.all@gmail.com*

Keywords :
Pentahelix Governance, Tourism Village Governance, Tourism Village

Kata Kunci :
Pentahelix Governance, Tata Kelola Desa Wisata, Desa Wisata

Abstract
The development of sustainable tourism villages is an important focus in tourism development in Indonesia. Bantaragung Village in Majalengka Regency possesses both natural potential and community traditions that are conducive to development. This research aims to analyze the development of sustainable tourism villages in Bantaragung Village using the pentahelix approach. The research employed a qualitative method, utilizing descriptive narrative analysis. The findings of this study indicate that effective collaboration among the government, private sector, community, academic institutions, and media has been instrumental in the establishment of sustainable tourism villages. The community plays a pivotal role in the sustainability of the tourism village, while the village government establishes the management policy. The private sector has been instrumental in facilitating infrastructure development, including the establishment of homestays, roads, and local transportation systems. Universities contribute to the advancement of sustainable tourism village development models through academic studies. Finally, social media was identified as the primary promotional tool to introduce Bantaragung Village's tourism potential to a broader audience.

Abstrak
Pengembangan desa wisata berkelanjutan menjadi fokus penting dalam pembangunan pariwisata di Indonesia. Desa Bantaragung di Kabupaten Majalengka memiliki potensi alam dan tradisi masyarakat yang dapat dikembangkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengembangan desa wisata berkelanjutan di Desa Bantaragung dengan pendekatan pentahelix. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, masyarakat, perguruan tinggi, dan media mampu mendorong terciptanya desa wisata berkelanjutan. Masyarakat berperan penting dalam keberlanjutan desa wisata, sedangkan pemerintah desa menetapkan kebijakan pengelolaan. Pihak swasta mendukung pengembangan infrastruktur seperti homestay, akses jalan-

dan transportasi lokal. Perguruan tinggi berkontribusi melalui kajian akademik mengenai model pengembangan desa wisata berkelanjutan. Media sosial dipilih sebagai sarana promosi utama untuk memperkenalkan potensi wisata Desa Bantaragung kepada khalayak luas.

PENDAHULUAN

Banyak desa di Indonesia menyimpan potensi alam dan budaya yang khas, yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Upaya mengangkat potensi pariwisata ini sejalan dengan tujuan pembangunan sektor kepariwisataan nasional. Pemerintah telah menggulirkan kebijakan pembangunan kepariwisataan berbasis desa wisata dengan sejumlah tujuan penting, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, menjaga kelestarian alam dan lingkungan, serta melestarikan sumber daya dan nilai-nilai budaya lokal.

Lebih jauh, desa wisata diharapkan bisa memperkuat ketahanan desa, baik dalam hal ketahanan pangan maupun energi, serta membangun kemandirian komunitas pariwisata di tingkat lokal. Pengembangan desa wisata tentu tidak bisa dilepaskan dari peran aktif para pemangku kepentingan lokal, seperti pemerintah, sektor swasta, akademisi, media, dan masyarakat. Karena itu, desa wisata dikembangkan dalam kerangka pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Menurut Sharpley pembangunan berkelanjutan dalam konteks pariwisata menekankan pada pemanfaatan sumber daya alam dan manusia untuk jangka Panjang (Budiani et al., 2018). Harapannya, desa wisata mampu tumbuh tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Pembangunan berkelanjutan setidaknya bertumpu pada lima prinsip utama, yaitu partisipasi, integrasi, pemerataan, keanekaragaman, dan visi jangka panjang (Rahadian, 2016).

Agar pariwisata yang dikembangkan memiliki kualitas, setiap elemen dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan perlu diperhatikan secara serius. Di samping itu, strategi yang tepat juga menjadi kunci utama dalam pengembangannya (Kuswandi, 2020). Safitri dan Juliprijanto menegaskan bahwa strategi pembangunan harus mencakup kebijakan pelaksanaan, perumusan tujuan yang ingin dicapai, serta metode dalam mengelola sarana dan prasarana yang tersedia (Wijaya & Safitri, 2022). Dalam praktiknya, strategi harus selaras antara tujuan, sarana, dan cara pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk aktif melakukan pengembangan sarana dan prasarana guna menunjang sektor pariwisata.

Hubungan yang harmonis dan saling mendukung antar aktor sangat penting dalam merumuskan strategi pembangunan desa wisata demi tercapainya

kesejahteraan masyarakat (Nurhadiyanti, 2019). Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata masih banyak digerakkan oleh negara, sementara masyarakat cenderung hanya menjadi penonton. Akibatnya, kapasitas lokal untuk merespons inovasi yang digagas pemerintah sering kali masih menghadapi tantangan besar (Maturbongs & Lekatompessy, 2020). Karena itu, peran pemerintah desa menjadi sangat vital dalam membangkitkan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar turut merasa memiliki serta bertanggung jawab dalam proses pembangunan desa wisata.

Dalam beberapa kasus, pembangunan pariwisata diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, yang berarti memberikan ruang besar bagi sektor swasta untuk terlibat. Memang, keterlibatan swasta diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, namun tidak jarang justru memunculkan ketimpangan kesejahteraan. Dengan kata lain, dominasi swasta yang berlebihan dalam strategi pembangunan bisa menghambat tujuan utama pembangunan itu sendiri—yakni kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kehadiran pemerintah sangat diperlukan untuk mengawasi dan mengendalikan peran sektor swasta, agar kebijakan pembangunan tetap fokus pada kesejahteraan masyarakat. Hidayat mengungkapkan bahwa istilah *Sustainable Tourism* (pariwisata berkelanjutan) dan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) sering kali menimbulkan beragam respons dari berbagai pihak, termasuk pemimpin lembaga pariwisata, perencana, dan aktivis lingkungan, mulai dari yang skeptis hingga yang mendalami secara serius (Hidayatullah et al., 2023). Maka, pariwisata berkelanjutan adalah bentuk pariwisata yang mempertimbangkan secara menyeluruh dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan baik saat ini maupun di masa depan, serta berupaya menjawab kebutuhan pengunjung, pelaku industri pariwisata, dan lingkungan.

Dalam konteks pengembangan desa wisata, keterlibatan sektor swasta memang dibutuhkan, terutama untuk mendukung promosi dan pengembangan kawasan. Namun demikian, negara melalui pemerintah dituntut untuk tetap bersikap tegas dan bijak dalam mengatur dinamika pasar, agar pembangunan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan swasta perlu diawasi bersama oleh masyarakat, yang dalam hal ini berperan sebagai subjek sekaligus objek pembangunan desa wisata. Selain itu, kalangan perguruan tinggi juga memiliki peran penting sebagai lembaga yang bisa memberikan kajian dan masukan berbasis keilmuan. Tak kalah penting, media juga memainkan peran strategis dalam menyuarakan dan mempromosikan potensi desa wisata. Maka, keseimbangan peran dari kelima aktor ini—pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media—sangat krusial untuk mewujudkan pembangunan desa wisata yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Gagasan tentang desa wisata sendiri lahir sebagai upaya untuk menggabungkan berbagai potensi wisata yang ada di desa, termasuk gaya hidup dan budaya masyarakat desa yang khas, menjadi suatu daya tarik wisata. Secara teori, seluruh wilayah desa bisa dikembangkan menjadi desa wisata, namun pengembangannya juga bisa dilakukan hanya pada bagian tertentu dari desa tersebut. Menurut Kurniawati, arah pengembangan desa wisata seharusnya menuju ke konsep desa wisata berkelanjutan, yang mencakup partisipasi para pemangku kepentingan, kepemilikan lokal, pemanfaatan sumber daya secara lestari, pengakomodasian tujuan masyarakat, pengelolaan daya dukung, pemantauan dan evaluasi, akuntabilitas, serta pelatihan dan promosi (Bahri et al., 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya juga telah banyak membahas topik pengembangan dan pembangunan desa wisata, terutama dari sudut pandang kebijakan dan pemerintahan. Dalam konteks kepariwisataan, desa menjadi objek kajian yang menarik karena mampu menawarkan pengalaman yang khas bagi wisatawan, seperti suasana pedesaan yang alami. Desa sebagai objek wisata memberikan kesan positif bagi wisatawan, dan hal ini perlu dipertahankan serta didukung dengan pengembangan lainnya (Haryanto & Utomo, 2018). Namun, sejumlah orang menilai bahwa dominasi pemerintah dalam pembangunan desa wisata justru tidak selalu berdampak positif (Sidiq & Resnawaty, 2017). Sebaliknya, keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam mengembangkan potensi desa wisata. Di sisi lain, Syah memaparkan bahwa peran pemerintah, khususnya pemerintah daerah hingga ke tingkat desa, tetap sangat diperlukan, terutama dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat desa wisata (Syah, 2017). Dari ketiga penelitian tersebut, bisa disimpulkan bahwa masih banyak faktor lain yang dapat berkontribusi dalam mendukung pembangunan dan pengembangan desa wisata.

Penelitian ini secara khusus berfokus pada bagaimana masing-masing pihak menjalankan peran dan kontribusinya secara kolaboratif dalam pembangunan desa wisata. Fokus analisis akan mengacu pada pendekatan *pentahelix*, yang mencakup lima aktor utama: pemerintah, swasta, perguruan tinggi, media, dan masyarakat, dalam konteks pengembangan desa wisata berkelanjutan di Desa Bantaragung, Kabupaten Majalengka.

Kabupaten Majalengka sendiri, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat, memiliki potensi alam, adat istiadat, dan budaya yang khas untuk dikembangkan sebagai desa wisata. Keindahan alam dan kekayaan budaya di wilayah ini menyimpan daya tarik besar yang bisa digali lebih jauh. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya akan melihat peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa wisata di Desa Bantaragung, tetapi juga akan

mengeksplorasi peran penting dari sektor swasta, kalangan akademisi, dan media massa.

Keberhasilan pembangunan desa wisata bergantung pada peran berbagai pemangku kepentingan. Setiap pihak yang terlibat memiliki kepentingan dan harus memperhatikan potensi serta perannya sebagai pelaku dalam pembangunan pariwisata desa tersebut. *Pentahelix* merupakan salah satu pendekatan dalam pengembangan pariwisata di Indonesia yang dijelaskan sebagai tata kelola antar *stakeholders* untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah kolaborasi, sehingga konsep *pentahelix* sangat berkaitan dengan konsep *Collaborative Governance* (Yunas, Susanti, Izana, & Widyawati, 2023) (Yunas et al., 2023). *Pentahelix* berperan penting dalam mendukung tujuan inovasi serta berkontribusi terhadap kemajuan pengelolaan obyek wisata (Halibas et al., 2017). *Pentahelix* selalu berkaitan dengan *multi stakeholder* yaitu pemangku kepentingan yang berperan besar dalam mencapai tujuan bersama (Solihah et al., 2018). Dengan demikian jelas bahwa peran-peran dari masing-masing pemangku kepentingan saling mendukung dan saling melengkapi untuk keberhasilan pengembangan pariwisata berkelanjutan (Nugroho et al., 2023). Dalam kajian tata kelola pemerintahan, penting untuk memahami peran aktor-aktor terkait dalam pengembangan desa wisata, yang meliputi pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, media, dan masyarakat desa, guna mencapai keberlanjutan desa wisata. Pendekatan pentahelix menjadi kunci analisis dalam pengembangan desa wisata ini, yang akan dibahas lebih lanjut dalam artikel ini, dengan fokus pada Desa Wisata Bantaragung, Kabupaten Majalengka.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif (Creswell, 2016). Sehingga menggambarkan fenomena dengan apa adanya mengenai suatu variabel penelitian dan menggunakan analisa pendekatan induktif dengan menekankan kualitas data penelitian bukan kuantitas data penelitian (Bungin, 2019). Penelitian deskriptif digunakan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana sinkronisasi serta strategi aktor *Pentahelix* dalam pengembangan Desa Wisata Bantar Agung di Kabupaten Majalengka dengan pendekatan *collaborative governance*. Peneliti memperoleh data yang lengkap dan detail, melalui observasi, wawancara dan data sekunder sehingga peneliti menggambarkan serta menginterpretasikan objek penelitian dengan apa adanya (Sukardi, 2021). Desain penelitian yang digunakan yaitu *sequential exploratory*, menurut Stones & McMillan yaitu peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dengan seluruh informan *pentahelix* secara mendalam (Creswell, 2016). Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan, dilengkapi dengan data tambahan seperti dokumen kebijakan. Data dalam penelitian terbagi

menjadi dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Keduanya dipergunakan dalam pembahasan dan analisis pada artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan desa wisata berkelanjutan sejalan dengan kebijakan pemerintah, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Dalam peraturan tersebut, ekosistem pariwisata digambarkan sebagai sistem yang kompleks, yang mencakup keterkaitan, rantai nilai, interkoneksi antar sektor dan komponen, serta produk dan jasa yang mendukung sektor pariwisata. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata berkelanjutan perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang saling terkait. Dalam penelitian ini, konsep pentahelix governance digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah, swasta, masyarakat, perguruan tinggi, dan media, yang merupakan aspek penting dalam pengembangan desa wisata. Dengan demikian dapat digambarkan pola hubungan dan keterkaitan yang terjadi dari setiap helix (pihak) tersebut nampak sebagai berikut:

Gambar : *Pentahelix* menurut Menteri Pariwisata Republik Indonesia (2016)



Sumber: Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
(gambar diolah Peneliti)

Dengan mengoptimalkan peran bisnis, pemerintah, komunitas, akademik, dan media, diharapkan tercipta orkestrasi yang memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, serta pengalaman dan nilai manfaat pariwisata. Hal ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dan lingkungan. Setiap

peran ini akan dianalisis melalui penelitian di Desa Wisata Bantaragung, Kabupaten Majalengka.

Pengembangan pariwisata di Desa Bantaragung dimulai sebagai inisiatif dari masyarakat setempat, yang pada awalnya masih sangat sederhana. Mereka hanya fokus pada perbaikan jalan dan tempat jualan. Wisatawan yang datang pun terbatas pada masyarakat lokal dari sekitar Majalengka, Cirebon, dan Kuningan. Seiring waktu, keberdayaan masyarakat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan dan perkembangan objek wisata alam di desa ini.

Berbagai pihak yang berperanan dalam pengembangan desa wisata di desa Bantaragung tersebut cukup beragam, mulai dari pemerintah desa setempat, masyarakat yang berada di sekitar obyek wisata, masyarakat pengrajin di desa, masyarakat yang bekerja di luar kota, pemerintah daerah, perguruang tinggi, dan media. Hal tersebut disampaikan oleh aparat Pemerintah Desa Bantaragung bahwa pemerintah desa berperanan dalam hal kebijakan dan penyiapan infrastrutuk yang dapat dianggarkan dari dana desa yang dituangkan dalam APB Desa. Selebihnya merupakan keswadayaan masyarakat dan berbagai pihak yang membantu.

Peranan Pemerintah

Pemerintah yang dimaksud dalam variabel ini mencakup pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Masing-masing memiliki kewenangan yang saling terkait, di mana pemerintah Desa Bantaragung bertindak sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah daerah, serta melaksanakan peranannya baik dalam kebijakan maupun tugas lainnya. Untuk memajukan sektor pariwisata, peran pemerintah daerah sangat penting sebagai sektor utama dalam merencanakan pembangunan dan pengembangan destinasi wisata (Hardiyanto et al., 2018). Untuk mengetahui kewenangan dan bagaimana peranan masing-masing, berdasarkan data temuan hasil penelitian dapat dideskripsikan pada variabel pemerintah sebagai berikut:

Peranan Pemerintah Desa

Dalam hal untuk memberikan jaminan dan kepastian dalam pengembangan desa wisata, terutama dalam hal keberdayaan masyarakat pariwisata, pemerintah desa Bantaragung memiliki peranan yang sangat penting. Hal tersebut dibuktikan dengan ditetapkannya kebijakan pemerintah desa berupa Peraturan Desa (Perdes). Peraturan Desa yang menaungi pengembangan desa wisata secara umum dituangkan dalam Peraturan Desa No. 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Desa Bantaragung. Dalam Perdes tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan sebagai upaya untuk mewujudkan ruang wilayah Desa Bantaragung yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan

berlandaskan wawasan desa. Secara detail disebutkan tiga tujuan utama yaitu: a) terciptanya keseimbangan antara lingkungan alam dan buatan; b) tercapainya integrasi dalam pemanfaatan sumber daya alam dan buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan c) tercapainya perlindungan fungsi ruang serta pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penggunaan ruang.

Adanya penetapan mengenai ruang wisata di desa Bantaragung tersebut, menjadikan bahwa Desa Wisata Bantaragung jelas telah menetapkan wilayah mana saja yang memiliki potensi alam yang baik untuk dikembangkan sebagai objek wisata alam. Perdes tentang Tata Ruang Wilayah Desa Bantaragung menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bantaragung serius dalam hal pengelolaan sumberdaya alam. Mereka memikirkan keberlanjutan pembangunan masyarakat berbasis pada sumberdaya alam. Pembagian wilayah dimana didalamnya terdapat potensi alam yang dapat dioptimalkan sebagai obyek wisata, maka merencanakan, membuat dan mengelolanya bersama-sama antara pemerintah desa dengan warga Masyarakat. Hal tersebut nampak komitmen masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, misalnya di kawasan curug cipeuteuy, terdapat kelompok sadar wisata (Pokdarwis),masyarakat yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata Curug Cipeuteuy tersebut.

Untuk mengimplementasikan Perdes Tata Ruang, berkaitan dengan Pembangunan kepariwisataan, Pemerintah Desa menetapkan Perdes Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Desa Tahun 2022-2032. Perdes ini menjadi dasar kebijakan turunannya dalam Pembangunan kepariwisataan di Desa Bantaragung. Didalam RIPPAR Desa, Desa Bantaragung tersebut didalamnya memuat visi,misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi. Selain itu dituangkan juga indikasi program kepariwisataan Desa Tahun 2023-2027. Keseriusan Pemerintahan Desa Bantaragung dalam Pembangunan kepariwisataan desa ditegaskan dalam visi Pembangunan kepariwisataan desa yaitu:" Bantaragung menjadi Destinasi Pariwisata Utama Jawa Barat Yang Bernuansa Harmoni alam dan Budaya Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Memperhatikan arah kebijakan Pembangunan kepariwisataan desa Bantaragung tersebut nampak bahwa pemerintahan desa memberikan ketegasan bahwa arah tersebut akan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan juga pelaksanaan Pembangunan kepariwisataan di desa Bantaragung. Secara ranah kebijakan, arah Pembangunan kepariwisataan Desa Bantarung menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen Pembangunan kepariwisataan.

Untuk menjamin pelaksanaan pariwisata di Desa Bantaragung, telah ditetapkan Peraturan Desa Bantaragung No. 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Desa. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian

dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif. Peraturan ini menegaskan bahwa tujuan pengelolaan desa wisata adalah untuk mengelola potensi desa guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, terlihat bahwa Pemerintah Desa Bantaragung telah responsif dalam mengelola desa wisata yang berkelanjutan.

Komitmen pemerintah desa juga tercermin dalam pembangunan desa wisata sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Pemerintah Desa Bantaragung terus berusaha mengoptimalkan perannya, khususnya dalam hal kebijakan serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pariwisata. Sebagai bagian dari jaminan penyelenggaraan desa wisata, pemerintah desa melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk monitoring dan evaluasi terhadap setiap usaha pengembangan desa wisata. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk pembinaan dan pengawasan selanjutnya dalam menjaga keberlanjutan desa wisata.

Peranan Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Majalengka memiliki komitmen yang baik dalam Pembangunan kepariwisataan berbasis alam. Hal tersebut nampak dari kebijakan Peraturan Daerah Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Majalengka Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 1). Dalam Perda tersebut salah satunya diuraikan mengenai kepariwisataan. Karena Desa Bantaragung termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Sindangwangi, dalam Perda tersebut ditetapkan sebagai Kawasan menjadi Pengembangan Kepariwisataan. Wisata yang dikembangkan di Kecamatan Sindangwangi berupa ekowisata Batuluhur dan Sindangwangi Minawisata.

Selanjutnya dalam kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RPD) Kabupaten Bekasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No 8 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2025, didalamnya ditetapkan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten (KSPK), Didalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa wilayah Kecamatan Sindangwangi sebagai salah satu Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaaten Majalengka. Memperhatikan pada kebijakan tersebut jelas bahwa Kecamatan Sindawangi yang didalamnya ada desa wisata Bantaragung merupakan wilayah yang dikembangkan kepariwisataannya berbasis alam. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah kabupaten Majalengka memiliki komitmen yang baik bagi Pembangunan pariwisata berkelanjutan di Desa Bantaragung yang sudah ditetapkan sebagai desa wisata di Kabupaten Majalengka. Beberapa objek wisata yang ada di Desa Bantaragung menjadi destinasi wisata yang terus dikembangkan.

Peranan Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat fokus pada pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten dan Kota di provinsi ini. Untuk mendukungnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat 2015-2025. Peraturan ini mengatur berbagai hal, termasuk ketentuan umum, ruang lingkup, pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran, kelembagaan, pembiayaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor pariwisata. Dalam perda tersebut, dijelaskan bahwa tujuan utama adalah menjadikan Jawa Barat sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia yang terintegrasi, berkelanjutan, dan mengutamakan nilai-nilai budaya. Visi ini menekankan pentingnya peran optimal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan, yang menunjukkan komitmen kuat pemerintah provinsi dalam sektor pariwisata.

Dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya, dan buatan, pemerintah memperkuat keterpaduan dalam mengembangkan potensi pariwisata alam khas masing-masing daerah. Untuk Kabupaten Majalengka, Perda No. 15 Tahun 2015, Pasal 27, menyebutkan bahwa Majalengka termasuk dalam kawasan pengembangan ekowisata alam pegunungan, khususnya di wilayah Gunung Ciremai.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat konsen atas pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Majalengka, khusunya pada ekowisata di daerah kaki Gunung Ciremai yang didalamnya ada Desa Bantaragung. Dalam hal Desa Bantaragung ditetapkan sebagai desa wisata, Pemerintah Provinsi terus mendorong Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Masyarakat di Desa Bantaragung untuk terus meningkatkan kualitas layanan pariwisata baik dalam obyek wisata, sarana pendukung, kebersihan lingkungan wisata juga atraksi wisata yang ada di Desa Bantaragung.

Desa wisata Bantaragung didorong terus untuk menjadi desa wisata unggulan di Jawa Barat. Oleh karenanya Desa Wisata Bantaragung pernah meraih desa wisata Tingkat nasional. Dengan adanya dukungan dari Provinsi Jawa Barat, Desa Wisata Bantar Agung terus berkembang dan menjadi salah satu tujuan wisata Jawab Barat untuk wilayah Kabupaten Majalengka. Pemerintah provinsi Jawa Barat cukup baik dalam mendukung Pembangunan desa wisata Bantarargung, sehingga mampu mengantarkan menjadi juara nasional sebagai desa wisata.

Peranan Pemerintah Pusat

Kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengembangan desa wisata nampak dari kebjakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Pariwisata dan Industri Kreatif.

Beberapa peraan utama pemerintah pusat antara lain: Kebijakan dan regulasi; pendanaan dan bantuan teknis; Promosi dan pemasaran desa wisata; kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Melalui peran tersebut pemerintah pusat membantu meningkatkan potensi ekonomi local dan melestarikan budaya serta lingkungan di desa-desa wisata.

Dalam kebijakan, Pemerintah pusat menetapkan kebijakan yang mendukung pengembangan desa wisata, seperti regulasi mengenai pengelolaan pariwisata berkelanjutan, pemberian izin, serta panduan tata kelola desa wisata. Terkait dengan pendanaan dan bantuan teknis, pemerintah pusat menyediakan dana melalui program khusus, seperti Dana Desa, untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pariwisata di desa. Bentuk dukungan lain pemerintah memberikan bantuan teknis, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Terkait dengan promosi parisata desa, pemerintah melakukan promosi desa wisata melalui kampanye pariwisata nasional dan internasional, serta platform digital yang memperluas akses wisatawan. Selain beberapa peran tersebut Pemerintah pusat menjalin kemitraan dengan pihak swasta, BUMN, dan komunitas lokal untuk menciptakan ekosistem wisata yang mendukung pertumbuhan desa wisata.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memiliki beberapa kebijakan penting dalam pengembangan desa wisata di Indonesia. Kebijakan strategis yang baru-baru ini dilakukan oleh Kementrian Pariwisata dan ekonomi Kreatif yaitu denga Program Pengembangan 244 Desa Wisata Prioritas. Kemenparekraf fokus pada pengembangan desa-desa wisata yang memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan, baik domestik maupun internasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik pariwisata dengan memperbaiki infrastruktur dan mengoptimalkan sumber daya lokal.Program yang bisa dan sudah menjadi agenda tahunan adalah Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Dalam program ini merupakan pemberian penghargaan kepada desa-desa wisata terbaik di Indonesia, berdasarkan kategori tertentu. Program ini mendorong desa-desa untuk terus berinovasi dan menjaga kualitas pengelolaan pariwisata serta produk lokal yang mereka miliki. Dalam mendukung pelaku usaha wisata yang memiliki pengetahuan, wawasan dan kompetensi, Kemenparekraf sering memberikan pelatihan kepada masyarakat desa mengenai manajemen pariwisata, digitalisasi, dan ekonomi kreatif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola dan memasarkan desanya sebagai destinasi wisata. Program lainnya adalah digitalisasi desa wisata. Hal ini merupakan Upaya Pemerintah Pusat melalui Kemenparekraf untuk mendorong desa wisata untuk memanafaatkan teknologi digital dalam promosi dan pemasaran. Platform digital digunakan untuk memudahkan akses wisatawan dan meningkatkan daya saing desa wisata di era digital.Program lainnya adalah pengembangan produk wisata berkelanjutan.

Dalam program tersebut, Kemenparekraf mendorong desa-desa wisata untuk mengembangkan produk-produk wisata yang berkelanjutan, dengan fokus pada pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Hal ini juga termasuk dalam mendukung praktik wisata ramah lingkungan dan partisipasi komunitas lokal.

Untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah melalui Kemenparekraf bekerjasama dengan kementrian lain seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meningkatkan infrastruktur, aksesibilitas, dan konektivitas ke desa-desa wisata. Dengan kebijakan-kebijakan ini, Kemenparekraf berupaya meningkatkan kualitas desa wisata agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Peranan Masyarakat

Peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata Bantaragung sangat krusial karena mereka merupakan pihak utama dalam menjaga kelestarian dan keaslian desa wisata tersebut. Desa wisata Bantaragung sendiri berawal dari inisiatif warga setempat, yang membuat mereka sangat peduli terhadap pengembangan dan pemeliharaan kawasan wisata ini. Contohnya, di objek wisata Curug Cipeuteuy yang terletak di kaki Gunung Ciremai, masyarakat awalnya secara bersama-sama membersihkan kawasan tersebut menggunakan cangkul, menata dengan sederhana, dan bergotong royong. Kawasan hutan lindung yang dikelola oleh Kehutanan Ciremai kemudian berkolaborasi dengan masyarakat. Seiring waktu, kawasan wisata Curug Cipeuteuy menjadi lebih tertata dengan baik, menarik banyak wisatawan domestik yang berkunjung.

Dalam hal peranan Masyarakat pada beberapa objek wisata di desa wisata Bantaragung , antara lain dalam hal; 1) Pelestarian budaya dan tradisi Masyarakat yang sudah ada secara turun temurun, misalnya saja dengan adanya tradisi seren taun Dimana masarakat akan menyampaikan rasa Syukur atas hail pertanian dan kebunnya dengan adanya adat tersebut. 2) Masyarakat berperanan dalam hal menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan desa, seperti pengelolaan sampah, konservasi hutan, dan sumber daya air. 3) Masyarakat bisa membuka usaha penginapan, restoran, pemandu wisata, hingga jasa transportasi lokal, yang memberikan pengalaman otentik kepada wisatawan. Masyarakat bisa membuka usaha penginapan, restoran, pemandu wisata, hingga jasa transportasi lokal, yang memberikan pengalaman otentik kepada wisatawan. 4) Pada pemberdayaan Masyarakat local, mereka terlibat langsung dalam industri pariwisata, masyarakat dapat meningkatkan taraf ekonomi melalui usaha kecil seperti penjualan produk lokal, kerajinan tangan, dan kuliner khas. 5) Lebih jauh Masyarakat di desa wisaya Bantaragung gerlibat dan berpartisipasi aktif dalam perencanaan, penyusunan

program untuk pengembangan desa wisata. Salah satunya adalah dalam pengelolaan pedagang, parker dan pelayanan wisata yang akan melaksanakan kemah di tempat.

Peran aktif masyarakat ini tidak hanya memperkuat ekonomi desa, tetapi juga menjaga agar perkembangan wisata tetap berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan atau budaya setempat. Pada masyarakat di Desa Wisata Bantaragung ini, masyarakat benar-benar memegang peranan penting bahkan mereka mampu mengatur bagaimana pola dan sistem kerja dalam mengelola di Curug Cipeuteuy. Kondisi demikian menjadi salah satu poin untuk mencapai desa wisata yang maju. Keberadaaan Masyarakat pariwisata menjadi soko penting bagi memajukan pariwisata desa di Desa Bantararung.

Peranan Perguruan Tinggi

Dalam pengembangan desa wisata Bantaragung, berdasarkan informasi dari Aparat Pemerintah Desa dan pelaku usaha wisata di Curug Cipeuteuy, perguruan tinggi memiliki peran penting. Beberapa perguruan tinggi, melalui dosen dan mahasiswanya, telah melakukan kajian dan diskusi tentang pengembangan desa wisata Bantaragung, salah satunya dari Universitas Gadjah Mada. Dalam hasil rekomendasi dan masukannya antara lain perlunya membuat system informasi walaupun sederhana terkait desa wisata Bantaragung dan informasi terkait lainnya yang memudahkan berbagai pihak untuk mengetahui dan berwisata di desa Bantaragung. Ada juga beberapa mahasiswa dan dosen melakukan pengabdian dengan target memberikan pelatihan mengenai manajemen usaha wisata dan juga produk-produk oleh oleh berbasis bahan yang ada di desa.

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pengembangan desa wisata melalui berbagai aspek ilmiah, sosial, dan ekonomi. Berbagai peran tersebut dilakukan oleh Perguruan tinggi dengan tridharma yang dimilikinya. Beberapa peran utama perguruan tinggi terkait dengan pengembangan desa wisata dilakukan melalui :

a. Riset dan Pengembangan: Perguruan tinggi dapat melakukan penelitian untuk memetakan potensi pariwisata desa, analisis pasar, dan kajian kelayakan sehingga pengembangan desa wisata bisa lebih terarah dan berkelanjutan.
b. Pendampingan dan Penyuluhan: Mahasiswa dan dosen dapat memberikan pendampingan kepada masyarakat desa dalam bidang manajemen pariwisata, teknologi, serta pemasaran untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan.
c. Inovasi Teknologi: Dengan keterlibatan perguruan tinggi, teknologi modern seperti digitalisasi promosi (melalui media sosial atau situs web) dapat

diterapkan untuk memperluas jangkauan pasar desa wisata dan mempermudah akses informasi bagi wisatawan.

d. Penguatan SDM (Sumber Daya Manusia): Melalui program pelatihan dan edukasi, perguruan tinggi membantu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal keterampilan wisata, hospitality (keramahtamahan), dan bahasa asing.
e. Pengembangan Produk Kreatif: Melalui kolaborasi dengan mahasiswa dan dosen, perguruan tinggi dapat membantu menciptakan produk-produk kreatif atau paket wisata yang sesuai dengan tren pasar dan karakteristik desa.
f. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Swasta: Perguruan tinggi bisa menjadi jembatan antara desa wisata dengan pemerintah atau pihak swasta untuk mendapatkan dukungan, baik berupa pendanaan maupun fasilitas pengembangan infrastruktur.

Dengan demikian, perguruan tinggi berperan sebagai mitra strategis dalam menciptakan desa wisata yang inovatif, berkelanjutan, dan kompetitif. Tentu saja keterlibatan perguruan tinggi tersebut, baik secara kelembagaan maupun pelibatan dosen dan mahasiswa dalam pengembangan desa wisata memerlukan n dukungan dari pemerintah setempat, baik pemerintah Kabupaten Majalengka dan Pemerintah desa Bantaragung.

Peranan Dunia Usaha

Peranan swasta dan dunia usaha dalam pengembangan desa wisata sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan keberlanjutan wisata. Di desa wisata Bantaragung keterlibatan swasta dan para pengusaha local maupun dari luar daerah nampak ada peranannya. Salah satunya penyediaan Resoran/Rumah makan, homestay dan juga beberapa café yang mulai bermunculan di sekitar desa wisata Bantaragung. Berikut beberapa peran utama mereka:

a. Investasi Infrastruktur: Swasta berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur seperti akses jalan, penginapan, fasilitas umum, dan pusat rekreasi. Ini meningkatkan daya tarik desa wisata dan kenyamanan bagi pengunjung.Pada aspek ini Nampak dilakukan dengan hadirnya beberapa restoran/café dan homestay di desa Bantaragung. Salahsatunya di Kawasan Rest Area Cikebo. Di Daerah tersebut sangat tepat karena selain bisa melihat pemandangan indah hamparan sawah juga memiliki akses yang baik ke berbagai arah.
b. Pengembangan Ekonomi Lokal: Dunia usaha dapat membantu membangun kerjasama dengan masyarakat lokal melalui pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) seperti penjualan produk lokal, souvenir, atau

kuliner khas, sehingga ekonomi desa semakin berkembang. Hal ini Nampak dengan banyak hadirnya pedagang , warung dan juga berkembangnya produksi gula aren dan kue yang ada di desa Bantaragung. Perkumpulan ibu-ibu UMKM juga merasakan adanya peranan dunia usaha dan swasta yang turut membantu berkembangnya usaha pedagang di Kawasan wisata di desa wisata Bantaragung.

c. Transfer Pengetahuan dan Teknologi: Perusahaan swasta dapat menyediakan pelatihan dan berbagi teknologi terbaru terkait manajemen, pemasaran, atau hospitality, sehingga masyarakat lokal bisa mengelola potensi pariwisata lebih efektif dan profesional. Hal ini pernah dilakukan oleh beberapa mitra dari Perusahaan yang dating ke desa Bantaragung dan memberikan sosialisasi dan pelatihan bagi Masyarakat pariwisata, pemuda dan pedagang di tempat wisata. Hal ini sangat penting agar pelaki usaha yang mendukung pengembangan desa wisata Bantaragung dapat berperanan secara optimal.
d. Pemasaran dan Promosi: Dunia usaha, terutama di sektor perhotelan, travel, dan media, dapat mempromosikan desa wisata melalui platform digital, media massa, atau paket tur wisata. Promosi yang lebih luas membantu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Terkait dengan peran ini, para pengusaha maupun sektor swasta pernah ada semacam hiburan kesenian dan juga menjadi sponsor dalam even kegiatan di Desa Bantaragung. Misalnya dalam kegiatan tradisi seren tahun.
e. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR): Melalui program CSR, perusahaan dapat mendanai proyek-proyek pelestarian lingkungan, pendidikan masyarakat, dan pelatihan keterampilan pariwisata, serta memperbaiki fasilitas umum di desa wisata. Terkait dengan ini, belum banyak yang dilakukan, namun pernah ada, salahsatunya dari Perusahaan telekomunikasi . Mereka memberikan semacam pelatihan dan juga membantu pengembangan usaha terutama dalam pelatihan usaha . Hal yang pernah dilakukan adalah pelatihan manajemen usaha kecil.
f. Kerjasama dalam Event dan Festival: Dunia usaha dapat berperan sebagai sponsor atau mitra dalam penyelenggaraan event budaya, festival, atau acara khusus yang dapat menarik wisatawan dan memperkenalkan keunikan desa kepada publik yang lebih luas. Ini pernah dilakukan pada acara seren tahun dan beberapa even yang berkaitan dengan peringatan hari besar nasional.

Dengan kontribusi dunia usaha, pengembangan desa wisata menjadi lebih terarah dan berkelanjutan, serta mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi Masyarakat. Hal ini perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memberikan jaminan bahhwa desa wisata Bantaragung tetap ada dan terjaga dengan baik.

Peranan Media

Media memiliki peran strategis dalam pengembangan desa wisata, terutama dalam hal promosi, edukasi, dan peningkatan citra desa. Dalam era sekarang media bisa banyak macaam bentuknya. Ada media cetak (berbagai harian surat kabar); media audio seperti radio daerah; media audiovisual seperti stasiun televisi dan media sosial. Media tersebut memeliki perananya masing masing, namun untuk mempublikasikan terkait denga keberadaan desa wisata dan berbagai aktivitas di desa wisata tersebut. Berikut adalah beberapa peran utama media dalam pengembangan desa wisata:

a. Promosi dan Publikasi: media, baik cetak, online, maupun televisi, dapat mempromosikan desa wisata kepada khalayak luas, menarik lebih banyak wisatawan dengan memperkenalkan keindahan alam, budaya, dan potensi lokal. Terkait dengan peran ini, nampaknya desa wisata Bantaragung termasuk desa wisata yang dippromosikan melalui media ini, saat ini lebih banyak peranannya adalah media sosial yang disampaikan oleh para wisatwan dengan mempublikasikannya pada akun mereka. Selain itu pada media televisi dan juga website pemerintah maupun pihak pelaku usaha wisata banyak berperanan dalam mempromoiskan desa wisata Bantaragung.
b. Branding dan Citra: media membantu membangun dan memperkuat citra positif desa wisata melalui pemberitaan yang baik, liputan acara, dan ulasan wisatawan. Ini menciptakan identitas desa yang kuat dan menarik minat kunjungan. Pada Desa wisata Bantaragung, media pada umumnya memberikan branding dan citra pada desa Banataragung sebagai desa wisata berbasis alam, Keiandahan alam persawahan, gunung ciremaim danau dan juga curug menjadi citra dari Desa wisata Bantaragung ini. Oleh karenanya yang berkunjung ke desa Bantaragung ini bertujuan untuk menikmati indahnya pemanndangan alam, dan sejuknya udara di kaki Gunung Ciremai.
c. Edukasi Masyarakat: Media juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat lokal tentang pentingnya pariwisata yang berkelanjutan, cara menjaga lingkungan, serta pentingnya keramahan dan pelayanan yang baik kepada wisatawan. Masyarakat banyak belajar dengan membaca dan melihat bagaimana tanggapan wisatawan yang pernah berkunjung ke desa wisata Bantargung. Respon dari wisatawan yang ditulis atau disampaikan di media sosial, menjadi bahan evaluasi Masyarakat pelaku usaha wisata untuk terus memperbaiki sehingga citra baik dari desa wisata Bantaragung akan tetap dicapai.
d. Platform untuk Ulasan dan Feedback: Melalui media sosial, blog, dan situs ulasan, wisatawan dapat berbagi pengalaman mereka. Ulasan positif membantu meningkatkan reputasi desa wisata, sementara kritik dapat

menjadi masukan untuk perbaikan. Tentu saja hal ini akan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan desa wisata Bantargung. Oleh karenanya Masyarakat harus tetap berusaha agar citra desa wisata Bantaragung tetap baik dimata publik.

e. Penghubung dengan Pasar Global: Media digital memungkinkan desa wisata untuk dikenal hingga ke pasar internasional, membuka peluang untuk menarik wisatawan mancanegara dengan biaya promosi yang lebih efisien. Hal ini terbukti dengan pernah beberapa akali wisatawan mancanegara dating berkunjung ke desa wisata Bantaragung d an menginap beberapa hari di desa tersebut. Ini membuktikan bahwa desa wisata Bantaragung sudah mulai dikenal oleh wisatawan mancanegar. Tentu saja kondisi demikian perlu terus ditingkatkan.
f. Liputan Acara dan Festival: Media berperan dalam meliput berbagai acara atau festival di desa wisata, seperti kegiatan budaya, seni, dan olahraga, yang dapat meningkatkan daya tarik desa dan menjadikannya tujuan wisata utama. Hal seperti ini dilakukan dalam acara hajat desa dala seren tahun yang biasanya diselenggarakan setiap tahun. Momen ini sangat baik dan media berperanan penting untuk mempublikasiklannya ke dunia luar.

KESIMPULAN

Pengembangan desa wisata Bantaragung yang berorientasi berkelanjutan dapat optimal mencapai target dan sasaran melalui pendekatan *pentahelix*. Masing-masing helik memegang peranan secara mandiri dan kolaborasi sehingga mampu mewujudkan desa wisata Bantaragung sebagai tujuan wisata baik bai wisatawan lokal maupun domestik lainnya di wilayah Jawa Barat dan luar daerah. Dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di Desa Bantaragung, masyarakat lebih memanfaatkan potensi sumberdaya alam baik karena berada di kaki gunung ciremai maupun juga kondisi terasering alamnya yang bagus dengan view pemandangan yang indah. Modal keindahan alam dan budaya Masyarakat setempat menjadi dasar bagi pengembangan desa wisata bantaragung.

Kolaborasi governance yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, pengusaha/investor, perguruan tinggi dan media menunjukkan pada hasil yang baik. Namun hal yang paling nampak peranannya adalah adanya partisipasi Masyarakat yang tinggi dengan komitmen kolaborasi yang baik dalam kelompok sadar wisata baik dari pemuda, kelompok Wanita usaha dan pemerintah desa.

Faktor pendorong dalam pengembangan desa wisata Bantaragung berkelanjutan antara lain potensi alam, dukungan pemerintah, kesadaran masyarakat dan adanya kolaborasi yang sinergi antara pemangku kepentingan, termasuk juhga dari perguruan tinggi maupun media. Adapun yang menghambat

pengembangan desa wisata Bantaragung antara lain minimnya akses untuk mendapatkan sponsor dalam penndananngan pengembangan desa wisata secara berkelanjutan, selain itu masih terbatasnya kemampuan kelompok sadar wisata masyarakat dalam mempromosikan desa wisata Bantaragung.

Perlu dilakukan penguatan wisata alam karena Desa Bantaragung sudah memiliki potensi alam yang indah. Desa wisata Bantaragung belum memiliki produk khas desa yang dapat dijadikan sebagai ikon dari Desa Bantaragung sebagai oleh-oleh khas yang bisa dibawa dan dinikmati oleh wisatawan. Oleh karenanya perlu dilakukan kajian terkait ini dan harus segera ditetapkan sehingga menjadi branding bagi Desa wisata Bantaragug. Hal penting lainnya adalah meningkatkan akses dan fasilitas pendukung yang membuat wisatawan nyaman. Dalam hal ini perlu meningkatkan kualitas akses jalan menuju desa wisata untuk kemudahan wisatawan dalam mencapai Lokasi.

Mengoptimalkan media sosial dan situs web resmi desa wisata Bantaragung sebagai media informasi public. Berkolaborasi dengan influencer atau travel blogger juga dapat meningkatkan eksposur desa di kalangan wisatawan. Bekerjasama dengan agen perjalanan dan platform pariwisata untuk menjual paket wisata. Ini membantu mengintegrasikan desa ke dalam jaringan wisata yang lebih luas.

Dilakukan pemberdayaan Masyarakat terutama pokdarwis dalam membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang melibatkan berbagai pihak di desa, sehingga keuntungan dari kegiatan wisata lebih merata dan masyarakat merasa memiliki peran dalam pengembangan desa wisata.Mengadakan pelatihan bagi warga dalam bidang hospitality, bahasa asing, pemanduan wisata, atau kuliner agar mereka siap menyambut wisatawaan. Selain itu perlu mendorong masyarakat untuk membuat kerajinan khas atau produk oleh-oleh yang bisa dipasarkan ke wisatawan, seperti kerajinan tangan, pakaian tradisional, atau makanan khas.

REFERENCES

Bahri, A. S., Basalamah, A., & Rahmat, T. A. (2023). Penerapan kriteria desa wisata pada desa wisata Batulayang, Bogor, Jawa Barat. *KONTAN: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis*, *2*(1).

Budiani, S. R., Wahdaningrum, W., Yosky, D., Kensari, E., Pratama, H. S., Mulandari, H., & Kusmiati, Y. (2018). Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas di Desa Sembungan, Wonosobo, Jawa Tengah. *Majalah Geografi Indonesia*, *32*(1), 170–176.

Bungin, B. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodelogis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada.

Creswell, J. W. (2016). *Qualitative inquiry & Research Design: Choosing among five approaches* (Fourth Edi). SAGE Publications, Inc.

Halibas, A. S., Sibayan, R. O., & Maata, R. L. (2017). The Penta Helix Model of Innovation in Oman: An HEI Perspective. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, *12*, 159–174.

Hardiyanto, A., Soejanto, I., & Berlianty, I. (2018). Analisis strategi pembangunan desa wisata di sentra pengrajin keris. *Opsi*, *11*(1), 1–13.

Haryanto, E. S., & Utomo, T. P. (2018). *REDESAIN STAN PEDAGANG SUVENIR DI LINGKUNGAN MUSEUM SANGIRAN SRAGEN DENGAN PENDEKATAN ERGONOMI DAN BUDAYA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DAYA TARIK PRODUK DAN CITRA OBYEK WISATA*. https://doi.org/.

Hidayatullah, A., Ali, M., & Pahrudin. (2023). Kolaborasi Pentahelix Dalam Membangun Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, *7*(1), 304–314. https://doi.org/10.29408/jpek.v7i1.15085

Kuswandi, A. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, *8*(2), 90–113.

Maturbongs, E. E., & Lekatompessy, R. L. (2020). Kolaborasi Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Merauke. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, *3*(1), 55–63. https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.866

Nugroho, M. W., Yulianto, T., Gunawan, F., & Mudyanti, R. (2023). Akselerasi Pentahelix Pengembangan Desa Wisata "Pandansili" Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Abidumasy*, *4*(1), 1–9.

Nurhadiyanti. (2019). *Kolaborasi ABCGM+ dalam Pengembangan Pariwisata Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2018*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Rahadian, A. H. (2016). Strategi pembangunan berkelanjutan. *Prosiding Seminar STIAMI*, 46–56.

Sidiq, A. J., & Resnawaty, R. (2017). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di desa wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 38–44.

Solihah, A. W., Musiasa, I. N., & Shihab, M. (2018). Aktivitas Public Relations Pengelola Situs Pariwisata Tanjung Lesung Untuk Meningkatkan Jumlah Wisatawan. *Jurnal Komunikasi Global*, *7*(1), 42–52. https://doi.org/doi.org/10.24815/jkg.v7i1.10528

Sukardi. (2021). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya* (Edisi Revi). Bumi Aksara.

Syah, F. (2017). STRATEGI MENGEMBANGKAN DESA WISATA. *Proceeding SENDI_U*. https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi_u/article/view/5048

Wijaya, L., & Safitri, D. (2022). Public Relations Communication Strategy PT. Antam In Lobby And Negotiation. *Jurnal Komunikasi Dan Bisnis, 10(1), 1*(10), 16–23. https://doi.org/https://doi.org/10.46806/jkb.v10i1.840

Yunas, N. S., Susanti, A., Izana, N. N., & Widyawati, W. (2023). The Pentahelix Model in the Development of Agro-Culture-Based Edutourism in the Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Buffer Village Area (A Study in Tosari Village, Pasuruan Regency and Sapikerep Village, Probolinggo Regency). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, *11*(1), 76–85.